

**STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (PPKB) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PROGRAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
(STUDI DI KECAMATAN RAJABASA)**

(Skripsi)

**Oleh
DEASINTA EKA GIANINA
NPM 2216021128**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (PPKB) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* (STUDI DI KECAMATAN RAJABASA)

Oleh

DEASINTA EKA GIANINA

Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa. Penelitian ini dianalisis menggunakan kerangka teori strategi Kooten dalam perspektif J. Salusu, yang mencakup strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya, sebagai dasar untuk memahami pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rajabasa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penyuluh KB, Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi organisasi dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* hingga tingkat kelurahan. Strategi program diwujudkan melalui pendampingan keluarga berisiko *stunting*, edukasi gizi, pemberian tablet tambah darah, serta penguatan posyandu. Namun, strategi pendukung sumber daya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pelaksana, belum optimalnya pendanaan, serta lemahnya integrasi dan pemanfaatan data keluarga berisiko *stunting*. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan program. Meskipun Kecamatan Rajabasa mampu mempertahankan prevalensi *stunting* yang relatif rendah, keberhasilan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh implementasi program, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat dan dukungan lintas sektor yang lebih kuat dibandingkan kecamatan lain. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga pendamping, penguatan koordinasi antar-OPD, serta optimalisasi sistem pendataan terintegrasi agar strategi percepatan penurunan *stunting* dapat berkelanjutan dan efektif dalam jangka panjang.

Kata kunci: Strategi Pemerintah Daerah, Dinas PPKB, *Stunting*.

ABSTRACT

STRATEGY OF THE POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING (PPKB) OFFICE OF BANDAR LAMPUNG CITY IN THE STUNTING REDUCTION ACCELERATION PROGRAM (A STUDY IN RAJABASA DISTRICT)

By

DEASINTA EKA GIANINA

Stunting is a public health problem that directly impacts the quality of human resources and the nation's competitiveness. This study was analyzed using Kooten's strategic theoretical framework from J. Salusu's perspective, which includes organizational strategy, program strategy, and resource support strategy, as a basis for understanding the implementation of the stunting reduction acceleration program. This study aims to analyze the strategy of the Population and Family Planning Control Office (PPKB) of Bandar Lampung City in implementing the stunting reduction acceleration program in Rajabasa District. The research method used was a qualitative approach with a descriptive research type, through data collection techniques such as interviews, observation, and documentation with family planning instructors, Family Support Teams (TPK), and the community. The results showed that the organizational strategy was implemented through cross-sectoral coordination and the formation of a Stunting Reduction Acceleration Team down to the village level. The program strategy was realized through mentoring families at risk of stunting, nutrition education, the provision of iron tablets, and strengthening integrated health posts (Posyandu). However, the resource support strategy still faces obstacles such as limited number and capacity of implementing human resources, suboptimal funding, and weak integration and utilization of data on families at risk of stunting. These conditions hinder the program's consistency and sustainability. Although Rajabasa District has maintained a relatively low stunting prevalence, this success is influenced not only by program implementation but also by stronger community participation and cross-sectoral support compared to other districts. Therefore, this study recommends strengthening regional regulations, increasing the capacity and number of assistants, strengthening coordination between regional government agencies, and optimizing the integrated data collection system to ensure the strategy to accelerate stunting reduction is sustainable and effective in the long term.

Keywords: Local Government Strategy, PPKB Office, Stunting.

**STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA (PPKB) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PROGRAM
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
(STUDI DI KECAMATAN RAJABASA)**

Oleh

DEASINTA EKA GIANINA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**STRATEGI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
(PPKB) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING (STUDI DI KECAMATAN
RAJABASA)**

Nama Mahasiswa

Deasinta Eka Gianina

Nomor Pokok Mahasiswa

2216021128

Program Studi

Ilmu Pemerintahan

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si
NIP. 196405081993031004

Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P
NIP. 199102032024062004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Dr. Tabah Maryannah, S.I.P., M.Si
NIP. 197106042003122001

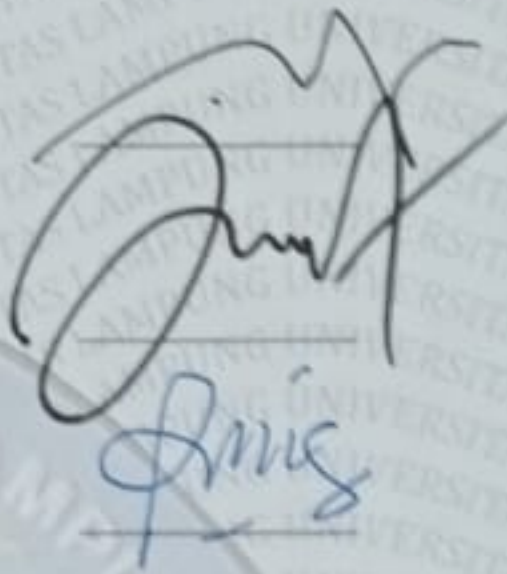
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si

Sekretaris : Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P

Penguji : Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Februari 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Februari 2026
Yang Membuat Pernyataan



Deasinta Eka Gianina
NPM. 2216021128

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Deasinta Eka Ganina yang lahir di Pekalongan, pada 7 Desember 2003. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Teguh Sugiyanto dan Ibu Eva Dani Handayani. Penulis memiliki adik laki-laki bernama Damar Agung Sugiyanto.

Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri Pekuncen pada tahun 2010-2016. Lalu melanjutkan ke SMP N 1 Wiradesa pada tahun 2016-2019, dan SMA N 1 Wiradesa pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung.

Penulis mengambil jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selama menempuh studi, penulis aktif mengembangkan kompetensi melalui berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pengalaman tersebut meliputi MBKM Riset pada Agustus hingga Desember 2024 dengan fokus kajian mengenai 'Peluang dan Tantangan Penerapan Smart City di Kota Bandar Lampung'. Selain itu, penulis juga berhasil menyelesaikan program MBKM Magang di Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung pada periode Maret hingga Agustus 2025, di mana penulis ditempatkan pada Tim Kerja Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik.

Penulis aktif menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan dan menjadi salah satu anggota divisi Kajian dan Keilmuan serta pernah menjadi Staff Ahli Sekretaris pada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fisip pada tahun 2024. Selain itu penulis juga Aktif di Organisasi Eksternal PMII sebagai Wakil Sekretaris PMII Rayon Fisip pada tahun 2024.

MOTTO

"Allah SWT tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kemampuannya"

(Q.S Al-Baqarah:286)

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah:5)

“Kebahagiaan tidak hidup dalam kesendirian dia tumbuh dalam kebersamaan, dirawat melalui kesederhanaan dan dijaga lewat kesadaran bersama”

(KGPAA Mangkunegoro X)

“Witing Mulyo Jalaran Soko Rekoso Amarga Sopo Seng Temen Bakal Tinemu”

Kemuliaan/Kesuksesan datang dari perjuangan. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasilnya.

(Pepatah Jawa)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa syukur saya kepada Allah yang maha besar atas kuasa-Nya, yang selalu mengiringi setiap perjalanan hidup dan mempermudah urusan saya. Serta Nabi Muhammad SAW yang selalu melimpahkan kebahagiaan bagi setiap umatnya. Saya persembahkan karya kecil ini untuk:

Kedua Orang Tua Tercinta Ayah dan Ibu, Sosok yang senantiasa mencurahkan kasih sayang tanpa syarat, yang tidak pernah putus mendoakan di setiap sujudnya, memotivasi, memberikan semangat, serta selalu ada dan setia menyertai setiap langkah perjalanan hidup saya. Skripsi ini adalah bakti kecil untuk cinta kalian yang begitu besar.

Adikku Tersayang, Sebagai penyemangat dalam keluarga yang kehadirannya selalu memberikan dorongan bagi saya untuk menjadi teladan yang baik dan menyelesaikan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.

Diriku Sendiri, Tulisan ini adalah bentuk apresiasi tertinggi teruntuk diri saya sendiri yang telah berjuang sampai di tahap ini dengan melewati seluruh hambatan dan kejadian yang tidak mudah. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, tetap kuat, dan selalu memilih untuk bangkit kembali saat kata menyerah hampir saja menang. You did it!

Seluruh dosen jurusan Ilmu Pemerintahan dan staff yang telah berjasa dalam membimbing dan mengajarkan banyak pengalaman berharga selama saya menempuh dunia perkuliahan.

Almamaterku yang sangat kucintai dan kubanggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shalallahu 'alayhi Wa Sallam beserta keluarga dan para sahabat, semoga kita semua mendapatkan syafa'at beliau di Yaumil Akhir kelak. Skripsi dengan judul **“STRATEGI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (PPKB) KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (STUDI DI KECAMATAN RAJABASA)”** disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Selesaiannya penulisan skripsi ini adalah berkat motivasi dan pengarahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., Asean Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustiana Zaenal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Tabah Maryanah, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah tegas dalam mendidik dan kebijakan yang selalu memprioritaskan kepentingan mahasiswa.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Prof. Arizka Warganegara S.I.P., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan arahan dan motivasi sejak

semester awal hingga akhir sangat berarti dalam menjaga arah perjuangan penulis di kampus ini.

6. Bapak Dr. Pitojo Budiono M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih telah menjadi kompas di tengah kebingungan penulis. Ilmu, wejangan, dan kesabaran Bapak dalam membimbing bukan hanya membentuk kualitas skripsi ini, tapi juga membentuk pola pikir penulis menjadi lebih dewasa dan kritis.
7. Bapak Azis Ahmad, S.Sos., M.I.P., selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas ketelitian, saran, dan diskusi-diskusi hangat yang membangun. Setiap coretan saran dari Bapak adalah pelajaran berharga yang sangat penulis syukuri demi kesempurnaan karya ini.
8. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas masukan dan perspektif baru yang Ibu berikan telah membuka cakrawala berpikir penulis dan menyempurnakan karya sederhana ini.
9. Seluruh dosen dan staff jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan banyak bantuan dan arahan semasa perkuliahan dan dalam proses pengerjaan skripsi.
10. Ayahandaku tercinta, Abi Teguh Sugiyanto cinta pertama dan pahlawan bagi penulis. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras, dan pengorbanan yang Abi lakukan demi memastikan penulis mendapatkan pendidikan terbaik. Ketegaran Abi adalah kekuatan bagi penulis untuk tetap melangkah sejauh ini. Skripsi ini kusembahkan untuk melihat binar bangga di mata Abi.
11. Ibundaku tersayang, Umi Eva Dani Handayani madrasah pertama dan pelabuhan doa bagi penulis. Terima kasih karena tidak pernah berhenti mengetuk pintu langit melalui doa-doa di setiap sujud malam demi keberhasilan penulis. Kasih sayang dan pelukan hangat Umi adalah obat paling mujarab di saat penulis merasa lelah dengan dunia perkuliahan. Keberhasilan ini adalah milikmu, Mi.
12. Adikku tersayang ananda Damar Agung Sugiyanto, yang menjadi alasan bagi penulis untuk tidak pernah menyerah. Terima kasih atas keceriaan, canda tawa, dan pengertianmu. Keberadaanmu selalu menjadi pengingat

bahwa Kakak harus sukses agar bisa menjadi teladan dan kebanggaan untukmu. Teruslah berproses, doa Kakak selalu bersamamu.

13. Keluarga Besar Star's, terima kasih atas dukungan moral, materi, motivasi, dan doa yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan akademik penulis.
14. Keluarga Besar Murtedjo Trah, terima kasih atas kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah putus, memberikan kehangatan keluarga yang menjadi penyemangat penulis.
15. Keluarga Besar Daliyo Trah, terima kasih atas segala perhatian, doa, dan motivasi yang telah diberikan sehingga penulis tetap teguh dalam menyelesaikan studi diperantauan ini.
16. Kepada sosok pendukung yang luar biasa, Muhammad Ivan Devara. Terima kasih atas kesabaran dalam mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat di titik terendah, serta selalu meyakinkan penulis bahwa keberhasilan itu sudah dekat. Kehadiranmu membuat perjalanan yang berat ini terasa lebih ringan untuk dilalui.
17. Sahabat-sahabatku, Adelia Ayumariska, Luthfiyah Azzara, dan Aulia Dian Pinastika, yang menjadi saksi perjalanan hidup penulis sejak masa berseragam sekolah hingga kini. Terima kasih telah bertahan melewati berbagai fase pendewasaan bersama-sama. Kehadiran kalian adalah pelipur lara yang paling nyata, dan persahabatan kita adalah harta yang paling penulis syukuri di luar pencapaian akademik ini.
18. Teman-teman Kos Aisyah 40, Christina Fani, Dila Sapiru, Intan Zavira, Amelia Kusuma, Zakiya Devi, Astritia Latifa, Misye Zelvi dan Wulan Dwi, rumah kedua bagi penulis selama di Bandar Lampung. Terima kasih telah menemani dan bantuan-bantuan kecil yang sangat berarti sejak masa mahasiswa baru hingga saat ini. Kehadiran kalian yang membuat penulis tidak merasa kesepian meski jauh dari keluarga
19. Keluarga Besar Perwakilan Kemendukbangga Provinsi Lampung, khususnya pada Bidang Hukum, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik. Terima kasih atas kesempatan, ilmu praktis, dan kehangatan kekeluargaan yang diberikan selama penulis melaksanakan magang. Pengalaman

berharga ini telah membuka cakrawala penulis mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.

20. Teman Seperjuangan, Adib Al Hafiz, Bintang Bayu, Ridho Pratama, Gilang Febriansyah, Marsel Rafi, dan Fadia Ayu, terima kasih atas dinamika diskusi dan hari-hari panjang di kampus akan menjadi memori yang selalu penulis rindukan.
21. Keluarga Besar PMII Rayon FISIP Unila, yang menjadi rumah pertama dalam saya berproses di Organisasi luar kampus. Terimakasih atas semua ilmu dan pengalaman selama ini dan sampai saat nanti
22. Seluruh teman-teman seangkatan 2022 jurusan Ilmu pemerintahan yang telah menjadi teman dalam perkuliahan. Terimakasih atas semua cerita dan kenangan.
23. Seluruh keluarga besar dan semua teman yang tidak dapat disebutkan satu per satu, namun doanya selalu penulis rasakan di setiap kemudahan yang datang.
24. Terakhir, untuk Diriku Sendiri, yang sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tidak menyerah pada tekanan, tetap bangun meski terjatuh berkali-kali, tetap melangkah meski dengan tertatih, dan telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Kamu hebat, kamu kuat, dan kamu layak mendapatkan pencapaian ini. Tetaplah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Berbahagialah selalu dimana pun dan pastikanlah jiwa ini selalu ada di bagian hal baik di alam semesta.
25. Almamaterku tercinta..

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata “sempurna”. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca khususnya peneliti selanjutnya.

Bandar Lampung, Februari 2026

Penulis,

Deasinta Eka Gianina

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR KATA ASING.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konsep Strategi	12
2.1.1 Definisi Strategi	12
2.1.2 Tingkat-Tingkat Strategi.....	13
2.1.3 Jenis-Jenis Strategi.....	15
2.1.4 Analisis Strategi.....	17
2.2 Konsep <i>Stunting</i>	18
2.2.1 Pengertian dan Indikator <i>Stunting</i>	18
2.2.2 Faktor Penyebab <i>Stunting</i>	21
2.2.3 Dampak Jangka Pendek dan Panjang <i>Stunting</i>	22
2.2.4 Strategi Penanggulangan <i>Stunting</i>	24
2.3 Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	29
3.3 Fokus Penelitian	29

3.4 Subjek dan Informan Penelitian	30
3.5 Jenis Data.....	30
3.6 Teknik Pengumpulan Data	31
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	32
3.8 Teknik Pengolahan Data	32
3.9 Teknik Analisis Data	33
IV. GAMBARAN UMUM.....	34
4.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)	34
4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	35
4.1.2 Struktur Organisasi	36
4.1.3 Visi Misi	38
4.2 Kecamatan Rajabasa.....	38
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Hasil.....	43
5.1.1 Strategi Organisasi.....	43
5.1.2 Strategi Program	51
5.1.3 Strategi Sumber Daya	57
5.2 Pembahasan	67
5.2.1 Analisis Strategi Organisasi	67
5.2.2 Analisis Strategi Program	74
5.2.3 Analisis Strategi Sumber Daya Pendukung	82
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	89
6.1 Kesimpulan.....	89
6.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi <i>Stunting</i> Nasional.....	2
Tabel 1.2 Prevalensi <i>Stunting</i> Kota Bandar Lampung	2
Tabel 1.3 Prevalensi <i>Stunting</i> per Kecamatan di Kota Bandar Lampung.....	3
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
Tabel 2.1 Indikator <i>Stunting</i>	19
Tabel 2.2 Kategori <i>Stunting</i> Menurut WHO	20
Tabel 5.1 Koordinasi Lintas Sektor	46
Tabel 5.2 Pelaksanaan Mini Lokakarya	48
Tabel 5.3 Program Strategi Percepatan Penurunan Stunting	52
Tabel 5.4 Perbandingan Kebutuhan Ideal dan Kondisi Aktual PKB/PLKB.....	59
Tabel 5.5 Komposisi Petugas Lapangan Keluarga Berencana.....	60
Tabel 5.6 Komposisi Penyuluh Keluarga Berencana.....	61
Tabel 5.7 Observasi Pendampingan Keluarga oleh TPK.....	76
Tabel 5.8 Observasi Pelaksanaan Program Pembagian Telor.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	27
Gambar 5.1 Surat Keputusan Wali Kota.....	44
Gambar 5.2 Buku Pegangan DASHAT	55
Gambar 5.3 Surat Keputusan Lurah.....	58
Gambar 5.4 SE Kepala BKKBN	65

DAFTAR KATA ASING

<i>Business Strategy</i>	: Strategi Bisnis
<i>Corporate Strategy</i>	: Strategi Perusahaan
<i>Door to door</i>	: Pintu ke Pintu
<i>Enterprise Strategy</i>	: Strategi Perusahaan
<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>	: Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
<i>Functional Strategy</i>	: Strategi Fungsional
<i>Global National Report</i>	: Laporan Nasional Global
<i>Goal Directed Actions</i>	: Tindakan yang Terarah pada Sasaran
<i>Height for Age Z score</i>	: Skor Tinggi Badan untuk Usia Z
<i>Master Strategy</i>	: Strategi Utama
<i>Program Strategy</i>	: Strategi Program
<i>Purposive Sampling</i>	: Pengambilan Sampel
<i>United Nations Children's Fund</i>	: Dana Anak-Anak PBB
<i>World Health Organization</i>	: Organisasi Kesehatan Dunia

DAFTAR SINGKATAN

4T	: Terlalu muda, Terlalu tua, Terlalu dekat, Terlalu banyak
ASI	: Air Susu Ibu
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Catin	: Calon Pengantin.
DASHAT	: Dapur Sehat Atasi <i>Stunting</i> .
Elsimil	: Elektronik Siap Nikah dan
EPPBGM	: Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
Genting	: Gerakan Orang Tua Cegah <i>Stunting</i>
GNR	: <i>Global National Report</i>
HAZ	: <i>Height for Age Z score</i>
HPK	: Hari Pertama Kehidupan
KB	: Keluarga Berencana
Kemenkes RI	: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Korluh	: Koordinator Penyuluh (KB).
KRS	: Keluarga Resiko <i>Stunting</i>
MP	: Makanan Pendamping
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah.
Perwali	: Peraturan Wali Kota.
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
PK	: Pendataan Keluarga
PLKB	: Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
PPKB	: Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
PTM	: Penyakit Tidak Menular.

PUS	: Pasangan Usia Subur.
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SD	: Standar Deviasi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKI	: Survei Kesehatan Indonesia
SSGBI	: Survei Status Gizi Balita Indonesia
SSGI	: Survei Status Gizi Indonesia
TPK	: Tim Pendamping Keluarga.
TTD	: Tablet Tambah Darah
TTPS	: Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, yang kemudian berdampak pada terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, serta daya tahan tubuh anak (Kemenkes RI, 2022). Fenomena *stunting* tidak hanya berkaitan dengan isu kesehatan, melainkan juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan menentukan daya saing bangsa di masa mendatang. Namun demikian, penanganan *stunting* di berbagai daerah masih menghadapi permasalahan berupa ketidaksinkronan kebijakan, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya pelaksanaan program yang berorientasi pada keluarga sebagai sasaran utama intervensi. Apabila tidak segera ditangani, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam mencetak generasi unggul yang mampu berkompetisi secara global. Secara konseptual, *stunting* didefinisikan sebagai kondisi balita dengan tinggi badan lebih rendah dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis dalam waktu lama.

Secara global, laporan *Global Nutrition Report* tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 150,8 juta balita atau sekitar 22,2% di dunia mengalami *stunting*. Indonesia sendiri termasuk dalam lima besar negara dengan prevalensi *stunting* tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan angka 36,4% (UNICEF, WHO, & World Bank, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa *Stunting* merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kesehatan, tetapi juga ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

Secara nasional, prevalensi *stunting* menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka *Stunting* menurun dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022, kemudian 21,5% pada 2023, dan mencapai 19,8% pada tahun 2024 (Kemenkes RI, 2024). Meski demikian, angka tersebut masih belum mencapai target nasional sebesar 14% sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Tabel 1.1 Prevalensi *Stunting* Nasional (2021–2024)

Tahun	Persentase (%)
2021	24,4
2022	21,6
2023	21,5
2024	19,8

Sumber: Kemenkes RI (2024), SSGI 2022–2024 dalam Angka(2024)

Provinsi Lampung termasuk daerah dengan tingkat prevalensi *Stunting* yang masih perlu mendapat perhatian. Berdasarkan hasil SSGI 2024, prevalensi *Stunting* di Provinsi Lampung mencapai 15,9% (rentang kepercayaan 10,4–24,9%), masih di atas ambang batas WHO sebesar 20%. Walaupun angka tersebut menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, upaya percepatan penurunan masih harus diperkuat (Kemenkes RI, 2024).

Di tingkat kota, Bandar Lampung menunjukkan fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data BKKBN dan hasil SSGI, prevalensi *stunting* di Kota Bandar Lampung menurun cukup signifikan pada 2022, namun kembali meningkat pada 2023 sebelum menurun lagi di 2024.

Tabel 1.2 Prevalensi *Stunting* Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2024

Tahun	Prevalensi (%)
2021	19,4
2022	11,1
2023	13,4
2024	12,0

Sumber: BKKBN & Kemenkes RI (2021–2024)

Data tersebut menunjukkan adanya penurunan cukup signifikan dari tahun 2021 ke 2022, namun sedikit meningkat pada 2023 sebelum kembali menurun pada 2024. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun intervensi telah dilakukan, efektivitas program masih menghadapi dinamika lapangan yang kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program penurunan *stunting* belum sepenuhnya berjalan secara konsisten dan terstruktur, sehingga diperlukan pengelolaan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis strategi yang jelas.

Sebagai respons terhadap meningkatnya urgensi permasalahan *stunting* di Indonesia, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *stunting* yang menegaskan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai koordinator utama pelaksana program. Kebijakan nasional ini kemudian diimplementasikan secara berjenjang oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, termasuk Kota Bandar Lampung, sebagai wujud sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Namun, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah tidak cukup hanya mengandalkan program rutin, melainkan membutuhkan strategi yang mampu mengoordinasikan berbagai aktor, sumber daya, dan kepentingan agar tujuan percepatan penurunan *stunting* dapat tercapai secara efektif.

Pada tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, serta Surat Keputusan Gubernur Nomor G/103/VI.01/HK/2022 mengenai pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Lampung Tahun 2022–2024. Regulasi ini menjadi dasar koordinatif bagi kabupaten/kota untuk membentuk kelembagaan, mekanisme kerja, dan strategi percepatan penanganan *stunting* di wilayah masing-masing.

Menindaklanjuti kebijakan provinsi, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengambil langkah strategis melalui pelaksanaan Rembuk *Stunting* Kota Tahun 2024 sekaligus membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. TPPS ini menjadi forum koordinasi lintas sektor

yang melibatkan Dinas PPKB, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, pemerintah kecamatan/kelurahan, PKK, serta kader posyandu.

Selain itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung mendukung program percepatan penurunan *stunting* melalui dasar hukum lokal, seperti Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat prioritas pembangunan bidang kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, serta penguatan posyandu. Dukungan kebijakan juga diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, yang meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang *stunting*, namun menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berbagai intervensi spesifik dan sensitif *stunting* telah dilaksanakan oleh pemerintah kota bekerja sama dengan Dinas PPKB, antara lain pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, edukasi gizi dan kesehatan reproduksi, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan layanan posyandu dan pendataan keluarga berisiko *stunting*. Namun demikian, hingga saat ini Kota Bandar Lampung belum memiliki regulasi khusus berupa Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang secara eksplisit mengatur percepatan penurunan *stunting* secara komprehensif. Hal ini membuat kebijakan penanganan *stunting* masih bergantung pada regulasi nasional, provinsi, dan keputusan kepala daerah bersifat administratif. Ketergantungan tersebut berpotensi menimbulkan kelemahan dalam konsistensi pelaksanaan program di lapangan apabila tidak disertai dengan strategi daerah yang mampu mengintegrasikan kebijakan, program, dan sumber daya secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah kota melalui Dinas PPKB untuk tidak hanya menjalankan program, tetapi juga menyusun strategi kebijakan berbasis regulasi yang lebih kuat, terstruktur, dan berkelanjutan. Keberadaan regulasi khusus di tingkat kota dinilai dapat memperjelas pembagian tugas antar-organisasi perangkat daerah, menjamin alokasi anggaran yang memadai, memperkuat

koordinasi lintas sektor, serta memastikan keberlanjutan program percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandar Lampung.

Untuk memahami kondisi yang lebih mendalam, berikut disajikan data prevalensi *stunting* per kecamatan di Kota Bandar Lampung. Data ini memperlihatkan dinamika yang beragam antara tahun 2021 hingga 2024.

Beberapa kecamatan seperti Teluk Betung Timur, Panjang, dan Kedaton mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2022 hingga 2024, sedangkan kecamatan seperti Rajabasa, Way Halim, dan Bumi Waras menunjukkan prevalensi rendah dan relatif stabil. Perbedaan ini menggambarkan adanya ketimpangan antarwilayah dalam keberhasilan pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*.

Tabel 1.3 Prevalensi *Stunting* per Kecamatan di Kota Bandar Lampung (2021–2024)

No	Kecamatan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
1	Teluk Betung Barat	0.5	0.70	0.90	1.1
2	Teluk Betung Timur	16.2	12.84	29.53	36.2
3	Teluk Betung Selatan	9.3	0.74	17.03	20.9
4	Bumi Waras	0.5	1.81	0.90	1.1
5	Panjang	14.7	17.06	26.90	33.0
6	Tanjung Karang Timur	3.8	–	7.00	8.6
7	Kedamaian	1.7	3.00	3.17	3.9
8	Teluk Betung Utara	6.8	1.26	12.40	15.2
9	Tanjung Karang Pusat	3.1	1.69	5.57	6.8
10	Enggal	2.9	1.22	5.30	6.5
11	Tanjung Karang Barat	7.3	4.94	13.37	16.4
12	Kemiling	5.8	2.71	10.60	13.0
13	Langkapura	4.6	1.76	8.33	10.2
14	Kedaton	9.9	2.64	18.17	22.3
15	Rajabasa	0.6	0.32	1.13	1.4
16	Tanjung Seneng	8.4	4.72	15.33	18.8
17	Labuhan Ratu	3.7	1.66	6.77	8.3
18	Sukarame	3.2	0.91	5.93	7.3
19	Sukabumi	0.8	5.45	1.47	1.8
20	Way Halim	2.0	1.11	3.60	4.4

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, BKKBN, dan SSGI 2021-2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa kecamatan dengan angka *Stunting* tertinggi pada tahun 2024 adalah Teluk Betung Timur (36,2%), Panjang (33,0%), dan Kedaton (22,3%), sedangkan angka terendah tercatat di Rajabasa (1,4%), Bumi Waras (1,1%), dan Teluk Betung Barat (1,1%).

Perbedaan ini menunjukkan variasi pencapaian pelaksanaan program antar wilayah. Kecamatan dengan prevalensi rendah umumnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat dan intervensi lintas sektor yang lebih kuat, sementara kecamatan dengan prevalensi tinggi sering dihadapkan pada persoalan sosial-ekonomi, kepadatan penduduk, dan keterbatasan infrastruktur kesehatan.

Kecamatan Rajabasa, meskipun memiliki angka *stunting* yang rendah, tetap penting untuk diteliti karena termasuk dalam kategori wilayah rentan pangan sedang menurut *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2022*. Hal ini mengindikasikan adanya risiko ketahanan pangan dan sosial yang perlu diantisipasi untuk menjaga keberlanjutan hasil penurunan *stunting* di masa depan.

Sementara itu, Kecamatan Rajabasa menonjol sebagai wilayah dengan angka prevalensi *stunting* terendah secara konsisten. Pada tahun 2021 prevalensi *stunting* di Rajabasa tercatat hanya 0,6%, dan bahkan turun menjadi 0,32% pada tahun 2022. Angka ini jauh di bawah rata-rata kota (3,67%) dan menunjukkan capaian yang baik dibandingkan kecamatan lainnya. Berdasarkan SSGI 2024, Rajabasa diproyeksikan mempertahankan posisi sebagai kecamatan dengan prevalensi *stunting* paling rendah di Kota Bandar Lampung, yakni sekitar 1,4%.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa strategi dan intervensi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung di Kecamatan Rajabasa relatif lebih berhasil dalam mendorong percepatan penurunan *stunting* dibandingkan wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian ini secara akademik relevan untuk difokuskan pada Kecamatan Rajabasa sebagai studi kasus keberhasilan implementasi program percepatan penurunan *stunting* di tingkat kecamatan. Penelitian ini tidak hanya melihat keberhasilan capaian angka *stunting*, tetapi lebih menekankan pada bagaimana strategi Dinas PPKB dirumuskan dan diimplementasikan melalui aspek organisasi, program, dan pendukung sumber daya dalam percepatan penurunan *stunting*.

Namun, di lapangan masih dijumpai tantangan seperti keterbatasan tenaga pelaksana, lemahnya koordinasi antarinstansi, variasi kapasitas sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan data terintegrasi dalam perencanaan dan evaluasi program. Kondisi ini menegaskan bahwa percepatan penurunan *stunting* bukan sekadar urusan teknis kesehatan, melainkan juga bergantung pada kapasitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung memiliki peran penting dalam memperkuat fungsi koordinasi lintas sektor, penguatan keluarga, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga berisiko *stunting*. Peran tersebut menuntut adanya strategi yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga mencakup penguatan organisasi, perencanaan program yang tepat sasaran, serta dukungan sumber daya yang memadai agar intervensi yang dilakukan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat landasan empiris penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian terkait strategi pemerintah daerah dan penanganan *stunting*:

Tabel 1.4. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Husnah (2021)	Peran Pemerintah Daerah dalam Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Lombok Timur	Diperlukan koordinasi lintas OPD dan dukungan anggaran daerah agar intervensi berjalan efektif.	Menunjukkan pentingnya sinergi antarinstansi seperti Dinas PPKB dan Dinas Kesehatan.
2	Kurniawati (2022)	Implementasi Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Sleman	Program sensitif lebih efektif bila disertai edukasi keluarga dan pendampingan kader desa.	Relevan untuk memahami strategi komunikasi Dinas PPKB dalam edukasi masyarakat.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Utama Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
3	Ayu & Rahmadani (2023)	Strategi Dinas PPKB dalam Penurunan <i>Stunting</i> di Kota Padang	Strategi berbasis keluarga berisiko <i>Stunting</i> dan monitoring berkelanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan.	Memberi dasar konseptual bagi penelitian mengenai strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung.
4	Syahrani (2023)	Efektivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Kabupaten Banjar	Kolaborasi TPPS dengan tokoh masyarakat meningkatkan keberhasilan program.	Menguatkan urgensi kolaborasi lintas sektor di tingkat kota dan kelurahan.
5	Hinfa Mosshananza & Ayu Nadia Pramazuly (2024)	Strategi Pemerintah dalam Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Desa Kaliasin Kabupaten Lampung Selatan	Penerapan tiga strategi utama: organisasi, sumber daya, dan program melalui kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan keluarga.	Menjadi referensi empiris di wilayah Lampung yang relevan untuk membandingkan efektivitas strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung di Kecamatan Rajabasa.

Sumber : Diolah oleh peneliti

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada tabel di atas, terlihat bahwa upaya percepatan penurunan *stunting* di berbagai daerah menekankan pentingnya sinergi antarlembaga, koordinasi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan program.

Penelitian Husnah (2021) menegaskan bahwa koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan anggaran daerah menjadi dasar utama dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan penurunan *stunting*. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniawati (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan program percepatan *stunting* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan keluarga melalui edukasi gizi dan pendampingan kader di tingkat desa.

Sementara itu, Ayu dan Rahmadani (2023) menyoroti pentingnya strategi berbasis keluarga berisiko *stunting* dan pelaksanaan monitoring berkelanjutan oleh Dinas

PPKB sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka *stunting* di Kota Padang. Temuan ini diperkuat oleh Syahrani (2023) yang menemukan bahwa efektivitas program akan meningkat apabila Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) mampu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga lokal dalam menjalankan intervensi gizi maupun non-gizi.

Selanjutnya, penelitian Hinfah dan Pramazuly (2024) memperkaya kajian dengan pendekatan strategi yang lebih komprehensif, yaitu mencakup strategi organisasi, strategi pendukung sumber daya, dan strategi program, yang diterapkan melalui kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan keluarga di tingkat desa. Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan angka *stunting* secara signifikan di Lampung Selatan.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program percepatan penurunan *stunting* sangat ditentukan oleh sinergi kelembagaan, dukungan sumber daya, dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan-temuan tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini untuk menelaah bagaimana Dinas PPKB Kota Bandar Lampung menerapkan strategi serupa dalam konteks wilayah perkotaan, khususnya di Kecamatan Rajabasa yang memiliki capaian prevalensi *Stunting* terendah di kota. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan hasil studi sebelumnya, tetapi juga berupaya mengembangkan pemahaman baru mengenai implementasi strategi penurunan *stunting* di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu pemerintahan, khususnya dalam implementasi kebijakan publik berbasis kolaborasi antarsektor, serta kontribusi praktis bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memperkuat strategi Dinas PPKB untuk mencapai penurunan *stunting* yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah kota.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam program percepatan penurunan *stunting*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam studi strategi pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan dalam penanganan isu sosial. Penelitian ini memperkaya pemahaman konseptual mengenai penerapan strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan publik di tingkat lokal, sebagaimana dikaji dalam perspektif strategi pemerintahan menurut J. Salusu. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan model strategi pemerintahan daerah dalam penanggulangan *stunting* yang menekankan koordinasi lintas sektor, peran aktor pemerintahan daerah, serta keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari praktik pemerintahan yang partisipatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi

akademik dalam pengembangan teori pemerintahan daerah yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pemecahan masalah publik, khususnya dalam konteks kebijakan penurunan stunting.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya Dinas PPKB, dalam memperkuat strategi percepatan penurunan *stunting* melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pemberdayaan keluarga berisiko *Stunting*, dan penguatan peran kader. Bagi Kecamatan Rajabasa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mempertahankan capaian rendahnya prevalensi *stunting* melalui inovasi program berbasis keluarga. Selain itu, bagi masyarakat dan lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kolaborasi dalam upaya menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, sadar gizi, dan berketahanan pangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Definisi strategi pertama yang dikemukakan oleh Jauch & Glueck (dalam Akdon, 2011:13) menyebutkan bahwa Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Kemudian strategi menurut J. Salusu (2006:101) yaitu suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada dasarnya strategi itu sangat penting dipahami oleh setiap 15 eksekutif, manajer, kepala atau ketua, direktur, pejabat senior dan junior, pejabat tinggi, menengah, dan rendah. Hal ini harus dihayati karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada setiap tingkat.

Strategi merupakan upaya untuk mempertahankan mayoritas pemerintah, seperti partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung (Schroder dalam Pito 2006:196-197).

Strategi merupakan cara untuk mencapai sasaran jangka panjang. Strategi juga merupakan sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Dengan demikian ciri-ciri strategi yang utama adalah:

- a. *Goal directed actions*, yaitu aktifitas yang menunjukan “apa” yang diinginkan organisasi dan “bagaimana” mengimplementasikannya.
- b. Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas).
- c. Serta memperhatikan peluang dan tantangan (*Coulter* dalam Kuncoro, 2005).

Ada beberapa definisi tentang strategi, yaitu:

1. Strategi adalah kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*), kebijakan-kebijakan (*policy*) dan tindakan/program organisasi.
2. Strategi adalah rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi apa suatu organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapai keadaan yang diinginkan tersebut (Tripomo, 2005:23).

Strategi organisasi terdiri menjadi dua, yaitu strategi inovasi dan strategi peningkatan kualitas. Strategi inovasi ditinjau dari koordinasi antar unit kerja, pengembangan keahlian kerja, penyusunan pengembangan karier, pemberian insentif kerja, dan penetapan standar kerja. Kemudian strategi peningkatan kualitas ditinjau dari penjabaran deskripsi kerja, partisipasi dalam pengambilan keputusan, penilaian pekerjaan, keseragaman perlakuan, dan pelatihan dan pengembangan kualitas (Simamora, 2001:124–126).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di definisikan bahwa strategi adalah suatu rancangan yang digunakan untuk memilih tujuan yang akan dicapai secara baik sesuai dengan apa yang diharapkan baik pada individu maupun kelompok.

2.1.2 Tingkat-Tingkat Strategi

Merujuk pada pandangan Higgins (J. Salusu, 2006:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu: *Enterprise Strategy*, *corporate strategy*, *Business Strategy* dan *functional strategy*.

a. *Enterprise Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga 16 menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab dapat fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya dapat menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selengkap mungkin juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para

penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- 1) Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- 2) Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing, dan integrating*.
- 3) Strategi isu strategik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah.

Tingkat-tingkat strategi tersebut merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi.

2.1.3 Jenis-Jenis Strategi

Strategi dalam organisasi memiliki beragam jenis yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program. Menurut David (2016:221), strategi secara umum dibagi menjadi tiga kelompok utama.

1. Strategi integratif, yaitu strategi yang menekankan penguatan posisi organisasi melalui integrasi ke depan (*forward integration*), integrasi ke belakang (*backward integration*), maupun integrasi horizontal.
2. Strategi intensif, yang mencakup penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk sebagai upaya memperluas jangkauan organisasi.
3. Strategi diversifikasi, yang meliputi diversifikasi konsentris, horizontal, dan konglomerat untuk memperluas sektor kegiatan dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu program atau lini usaha.

Sejalan dengan itu, Chandler (dalam Salusu, 2015:88) membagi strategi menjadi tiga bentuk utama.

1. Strategi stabilitas digunakan ketika organisasi berada dalam kondisi aman dan fokus mempertahankan posisinya.
2. Strategi ekspansi diterapkan untuk memperluas program, wilayah kerja, atau melakukan inovasi baru.
3. Strategi rasionalisasi atau likuidasi dilaksanakan ketika organisasi mengalami keterbatasan sumber daya sehingga perlu menyederhanakan atau merampingkan kegiatan.

Selanjutnya, teori strategi yang digunakan sebagai landasan utama dalam penelitian ini adalah teori dari Kooten (dalam Salusu, 1996:104–105). Kooten mengelompokkan strategi ke dalam tiga bentuk utama, yaitu:

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi), yaitu strategi yang berkaitan dengan penetapan misi, tujuan, nilai, serta arah kebijakan utama organisasi. Strategi ini menjawab pertanyaan fundamental mengenai apa yang dilakukan organisasi dan untuk kepentingan siapa.
2. *Program Strategy* (Strategi Program), yaitu strategi yang menitikberatkan pada implementasi program-program organisasi serta dampaknya terhadap sasaran yang ingin dicapai. Strategi ini melihat bagaimana program menjadi alat untuk menghubungkan organisasi dengan lingkungan sosial guna mencapai tujuan kelembagaan (John, 2007:189).
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), yaitu strategi yang berfokus pada penguatan sumber daya organisasi, seperti

sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan teknologi agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Penelitian ini menggunakan teori strategi dari Kooten karena teori ini dinilai paling relevan dan operasional untuk menganalisis strategi organisasi publik, khususnya lembaga pemerintah seperti Dinas PPKB. Berbeda dengan teori David yang lebih banyak digunakan dalam konteks bisnis dan pemasaran, atau teori Chandler yang bersifat makro dan korporatif, teori Kooten lebih aplikatif untuk melihat bagaimana strategi pemerintah disusun, dijalankan melalui program, dan didukung oleh sumber daya.

Selain itu, pembagian strategi oleh Kooten menjadi tiga jenis strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya sangat sesuai dengan karakteristik penelitian ini yang berfokus pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting*. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji strategi dari hulu ke hilir, mulai dari arah kebijakan Dinas PPKB, bentuk program yang dijalankan, hingga dukungan sumber daya yang digunakan dalam implementasinya. Dengan demikian, teori Kooten tidak hanya memberikan kerangka analisis yang jelas dan sistematis, tetapi juga membantu memahami keberhasilan maupun hambatan strategi penurunan *Stunting* di Kecamatan Rajabasa.

2.1.4 Analisis Strategi

J.Salusu (2006:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Disimpulkan bahwa strategi merupakan kerangka dasar organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, selalu berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan hubungan yang menguntungkan. Strategi yang dibuat harus menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah sehingga strategi menjadi fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pengambil keputusan yang memiliki

peranan yang penting dalam menentukan kebijakan. Pengambilan keputusan harus tepat sasaran untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Pengambilan keputusan strategi menjadi hal yang penting untuk dilakukan dalam penyelesaian permasalahan. Pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Proses itu untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi.

Pengambilan keputusan memiliki suatu aturan kunci dalam pengambilan keputusan ialah sekali kerangka yang tepat sudah diselesaikan, keputusan dibuat. Keputusan dibuat untuk mempercepat tindakan perubahan maka dari itu, pengumpulan keputusan hendaknya dipahami dalam dua pengertian, yaitu penetapan tujuan yang merupakan terjemahan dari cita-cita, aspirasi, dan pencapaian tujuan melalui implementasinya. Pengambilan keputusan menjadi suatu proses yang harus dijalankan pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah diskusi. Diskusi untuk menentukan sebuah keputusan menjadi penting karena harus dapat menampung seluruh aspirasi dan harapan dari seluruh pihak dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak akan memiliki banyak alternatif keputusan yang baik sesuai dengan lingkungan masing-masing, sehingga harus disatukan dalam satu keputusan bersama dan implementasinya menjadi tanggung jawab bersama.

2.2 Konsep *Stunting*

2.2.1 Pengertian dan Indikator *Stunting*

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang mencerminkan kegagalan pertumbuhan anak balita akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. WHO (2020) mendefinisikan *stunting* sebagai kondisi tinggi badan menurut umur (*height-for-age*) yang berada di bawah standar pertumbuhan anak WHO. Anak dikatakan *stunting* apabila nilai *z-score* tinggi badan menurut umur berada di bawah -2 standar deviasi (SD), dan dikategorikan sangat *stunting* apabila berada di bawah

−3 SD. Dalam konteks kesehatan masyarakat, *stunting* umumnya terjadi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang meliputi masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini dikenal sebagai *golden period* karena kualitas gizi, pola pengasuhan, serta kesehatan ibu sangat menentukan perkembangan anak.

UNICEF (2021) menegaskan bahwa *stunting* bukan hanya berdampak pada kondisi fisik anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan kognitif, prestasi pendidikan, produktivitas, bahkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pengukuran *Stunting* umumnya menggunakan indikator antropometri, khususnya tinggi badan menurut umur (HAZ). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko seperti berat badan lahir rendah, status gizi ibu, pemberian ASI eksklusif, kualitas makanan pendamping ASI, sanitasi, air minum layak, serta tingkat pendidikan orang tua juga berperan penting. Oleh karena itu, *Stunting* dipandang sebagai masalah multidimensi yang membutuhkan intervensi multisektor, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis, berikut disajikan indikator dan kategori *stunting* menurut standar WHO serta kebijakan di Indonesia.

Tabel 2.1 Indikator *Stunting*

Indikator	Definisi / Kriteria	Kategori
<i>Height-for-age Z-score</i> (HAZ) < −2 SD	Anak balita dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah −2 standar deviasi dari median WHO <i>Growth Standards</i> dikategorikan <i>stunting</i> .	Moderat
<i>Height-for-age Z-score</i> (HAZ) < −3 SD	Anak balita dengan tinggi badan menurut umur di bawah −3 SD dari median WHO dikategorikan <i>severely stunted</i> .	Berat/parah
Berat Badan Lahir Rendah (< 2.500 gr)	Faktor risiko <i>stunting</i> sejak lahir.	Faktor risiko
Status gizi ibu	Gizi kurang, anemia, kurang pemeriksaan kehamilan.	Faktor risiko
ASI eksklusif 0–6 bulan	Hanya ASI tanpa tambahan makanan/minuman lain.	Faktor intervensi

Indikator	Definisi / Kriteria	Kategori
MP-ASI (setelah 6 bulan)	Pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai kualitas dan kuantitas.	Faktor intervensi
Sanitasi & air minum layak	Akses jamban sehat, air minum bersih.	Faktor risiko / intervensi sensitif
Pendidikan orang tua	Tingkat pendidikan ibu/ayah memengaruhi pola asuh dan pemenuhan gizi.	Faktor risiko sosial

Sumber: *World Health Organization* (WHO), 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2021.

Tabel 2.2 Kategori *Stunting* Menurut WHO

Kategori	Kriteria Z-score (HAZ)	Penjelasan
Normal	≥ -2 SD hingga $+3$ SD	Pertumbuhan anak sesuai dengan standar pertumbuhan WHO.
<i>Stunted</i> (Pendek)	< -2 SD s/d ≥ -3 SD	Anak mengalami gangguan pertumbuhan (<i>stunted</i>), lebih pendek dari anak seusianya.
<i>Severely Stunted</i> (Sangat Pendek)	< -3 SD	Anak sangat pendek dibandingkan standar WHO, menandakan masalah gizi kronis yang lebih serius.
Tinggi (Above Average)	$> +3$ SD	Anak lebih tinggi dari standar pertumbuhan WHO.

Sumber: *World Health Organization* (WHO), 2020.

Dari kedua tabel di atas dapat dipahami bahwa *stunting* tidak hanya dipandang sebagai kondisi kekurangan gizi kronis yang diukur melalui indikator antropometri, tetapi juga sebagai masalah multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, pola asuh, lingkungan, hingga aspek sosial-ekonomi. Kategori *Stunting* menurut WHO memberikan batasan yang jelas dalam mengklasifikasikan kondisi anak, sehingga memudahkan pemerintah maupun peneliti dalam melakukan pemantauan dan evaluasi program.

Dengan demikian, indikator dan kategori *stunting* menjadi dasar penting dalam analisis kebijakan publik, khususnya dalam menilai berjalannya program percepatan penurunan *stunting*. Pemahaman ini juga menjadi pijakan bagi penelitian untuk menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan oleh berbagai

aktor, termasuk Dinas PPKB sebagai sebagai koordinator lintas sektor, mampu berkontribusi dalam pencapaian target nasional penurunan prevalensi *Stunting*.

2.2.2 Faktor Penyebab *Stunting*

Stunting merupakan masalah kesehatan yang bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga penyebabnya tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *stunting* dipengaruhi oleh interaksi berbagai aspek, mulai dari gizi, kesehatan, lingkungan, hingga faktor sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor penyebab *stunting* sangat penting untuk merumuskan strategi kebijakan yang komprehensif dan efektif.

- 1) Asupan gizi yang tidak terpenuhi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak merupakan faktor utama yang menyebabkan *stunting*. Kekurangan energi, protein, dan mikronutrien seperti zat besi, serta vitamin A dapat menghambat pertumbuhan linear anak. Rahman et al. (2021) menegaskan bahwa anak yang mengalami defisit gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun memiliki risiko tinggi mengalami *stunting*. Kondisi gizi ibu hamil, termasuk status anemia dan kekurangan energi kronis, juga berkontribusi signifikan terhadap risiko lahirnya bayi dengan berat badan rendah yang berpotensi mengalami pertumbuhan terhambat
- 2) Sanitasi dan akses air bersih yang buruk menjadi faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap prevalensi *stunting*. Prendergast dan Humphrey (2019) menemukan bahwa paparan lingkungan yang tidak higienis meningkatkan risiko anak terinfeksi penyakit diare dan infeksi saluran pencernaan lainnya. Penyakit infeksi tersebut menyebabkan gangguan penyerapan zat gizi sehingga memperburuk status gizi anak. Di banyak daerah, kurangnya akses terhadap jamban sehat dan air bersih masih menjadi tantangan besar dalam penurunan *stunting*.
- 3) Pola asuh yang tidak tepat juga berperan penting dalam terjadinya *stunting*. Praktik pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif yang tidak optimal, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang terlalu dini atau

dengan kualitas gizi rendah, serta kurangnya pengetahuan orang tua mengenai praktik gizi seimbang menjadi penyebab umum.

Septiasari et al. (2022) menekankan bahwa edukasi gizi kepada ibu dan keluarga merupakan intervensi penting untuk mencegah terjadinya *stunting* pada anak usia dini.

- 4) Infeksi berulang pada anak, seperti diare, infeksi saluran pernapasan akut, atau penyakit parasit, memperburuk status gizi anak. Infeksi berulang tidak hanya menurunkan nafsu makan, tetapi juga mengganggu metabolisme serta daya serap nutrisi. Hossain et al. (2020) menyatakan bahwa anak yang sering mengalami infeksi berulang lebih rentan mengalami gagal tumbuh meskipun mendapatkan asupan gizi yang relatif cukup.

Selain faktor-faktor tersebut, penyebab *stunting* juga berkaitan erat dengan kondisi sosial-ekonomi keluarga dan tata kelola pemerintahan daerah. Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, serta kemampuan ekonomi rumah tangga sangat memengaruhi akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan, dan sanitasi yang memadai. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi program gizi juga menjadi kendala dalam penanganan *stunting* secara efektif.

Dengan demikian, faktor penyebab *stunting* bersifat multifaktorial dan saling terkait. Hal ini menuntut adanya kebijakan penanggulangan yang tidak hanya berfokus pada aspek kesehatan dan gizi, tetapi juga mencakup intervensi pada bidang pendidikan, ekonomi, sanitasi, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan multisektor menjadi kunci dalam memutus rantai penyebab *stunting*, sehingga upaya penurunan prevalensi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2.3 Dampak Jangka Pendek dan Panjang *Stunting*

Stunting tidak hanya menjadi persoalan kesehatan individu, tetapi juga merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional karena dampaknya yang bersifat multidimensional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut

tidak hanya terbatas pada aspek biologis, tetapi juga meluas pada aspek pendidikan, ekonomi, dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsekuensi *stunting* sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang bersifat holistik.

- 1) Jangka pendek : *Stunting* berdampak pada pertumbuhan fisik anak yang terhambat. Anak yang mengalami *stunting* cenderung memiliki tinggi badan lebih rendah dari rata-rata usianya, yang menandakan adanya gangguan pertumbuhan linear. Selain itu, *stunting* juga berpengaruh pada perkembangan motorik dan kognitif anak. Dewey dan Begum (2021) menjelaskan bahwa anak dengan kondisi *stunting* lebih rentan mengalami keterlambatan perkembangan motorik halus dan kasar, yang kemudian memengaruhi kesiapan anak dalam menerima pendidikan formal. Tidak hanya itu, *stunting* menurunkan daya tahan tubuh anak, sehingga anak lebih sering terserang penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan. Kondisi ini semakin memperburuk status gizi anak, sehingga terbentuk siklus buruk antara malnutrisi dan penyakit infeksi.
- 2) Jangka panjang *stunting* : menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko penurunan kecerdasan kognitif yang signifikan, sehingga berdampak pada rendahnya prestasi akademik di sekolah. Beal et al. (2018) menegaskan bahwa kapasitas belajar dan kemampuan kognitif yang rendah akibat *stunting* menyebabkan anak kesulitan beradaptasi dengan lingkungan pendidikan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat pendidikan yang dapat dicapai.

Selain itu, *stunting* juga berdampak pada produktivitas kerja di masa dewasa. Individu yang pernah mengalami *stunting* cenderung memiliki keterbatasan dalam kapasitas fisik maupun intelektual, sehingga daya saing mereka di pasar kerja lebih rendah dibandingkan dengan individu yang tumbuh secara normal. Kondisi ini tentu berimplikasi pada rendahnya pendapatan, meningkatnya beban ekonomi keluarga, serta potensi melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi. Lebih lanjut,

stunting meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) di usia dewasa, seperti obesitas, hipertensi, diabetes, hingga penyakit jantung koroner.

Hal ini terjadi akibat perubahan metabolisme tubuh yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis di masa awal kehidupan. Beban ganda malnutrisi ini bukan hanya menjadi persoalan kesehatan individu, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi sistem kesehatan nasional yang harus menanggung biaya pengobatan penyakit kronis dalam jangka panjang.

Akumulasi dari dampak jangka pendek dan jangka panjang *stunting* tersebut pada akhirnya akan memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) dan daya saing bangsa. Apabila prevalensi *Stunting* tetap tinggi, maka target pembangunan manusia yang unggul, sehat, dan produktif akan sulit tercapai. Dengan demikian, percepatan penurunan *Stunting* menjadi agenda prioritas dalam pembangunan nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Perpres No. 72 Tahun 2021. *Stunting* bukan hanya isu kesehatan, melainkan juga isu pemerintahan, ekonomi, dan sosial, sehingga memerlukan intervensi lintas sektor dan penguatan tata kelola kelembagaan di tingkat pusat maupun daerah.

2.2.4 Strategi Penanggulangan *Stunting*

Upaya penanggulangan *stunting* tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan *stunting* merupakan masalah multidimensional yang melibatkan faktor gizi, kesehatan, sanitasi, pendidikan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan *stunting* menuntut keterlibatan berbagai aktor, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, maupun keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Strategi penanggulangan *stunting* di Indonesia secara nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menetapkan target penurunan prevalensi *Stunting* hingga 14% pada tahun 2024.

Secara umum, strategi penanggulangan *stunting* terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik berfokus pada kelompok sasaran langsung, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Bentuk intervensinya antara lain pemberian tablet tambah darah, promosi dan pemberian ASI eksklusif, pemenuhan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang bergizi seimbang, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Intervensi ini diyakini mampu memberikan kontribusi sekitar 30% terhadap percepatan penurunan *stunting* (Kemenkes RI, 2022). Sementara itu, intervensi gizi sensitif mencakup program-program pembangunan yang berfokus pada faktor lingkungan dan sosial ekonomi yang memengaruhi status gizi anak. Misalnya, penyediaan air bersih dan sanitasi layak, peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, bantuan sosial untuk keluarga miskin, pendidikan gizi, serta peningkatan ketahanan pangan keluarga. Intervensi ini memberikan kontribusi lebih besar, yaitu sekitar 70% terhadap upaya penurunan *stunting* (UNICEF, 2021).

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, strategi penanggulangan *Stunting* memerlukan koordinasi lintas sektor yang efektif. Keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh sektor kesehatan, tetapi juga sektor pendidikan, sosial, pertanian, hingga pekerjaan umum. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam memastikan integrasi program di tingkat lokal. Penelitian Putri et al. (2022) menegaskan bahwa daerah yang memiliki koordinasi kuat antarinstansi cenderung berhasil menurunkan prevalensi *stunting* lebih signifikan dibandingkan daerah yang masih berjalan sektoral.

Selain itu, strategi penanggulangan *stunting* juga harus menekankan partisipasi masyarakat. Peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku keluarga dalam hal pola asuh, pemberian gizi, dan kebersihan lingkungan menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Dengan kata lain, upaya percepatan penurunan *stunting* tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, strategi penanggulangan *stunting* yang efektif adalah strategi yang mengintegrasikan intervensi spesifik dan sensitif, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan partisipasi masyarakat.

2.3 Kerangka Pikir

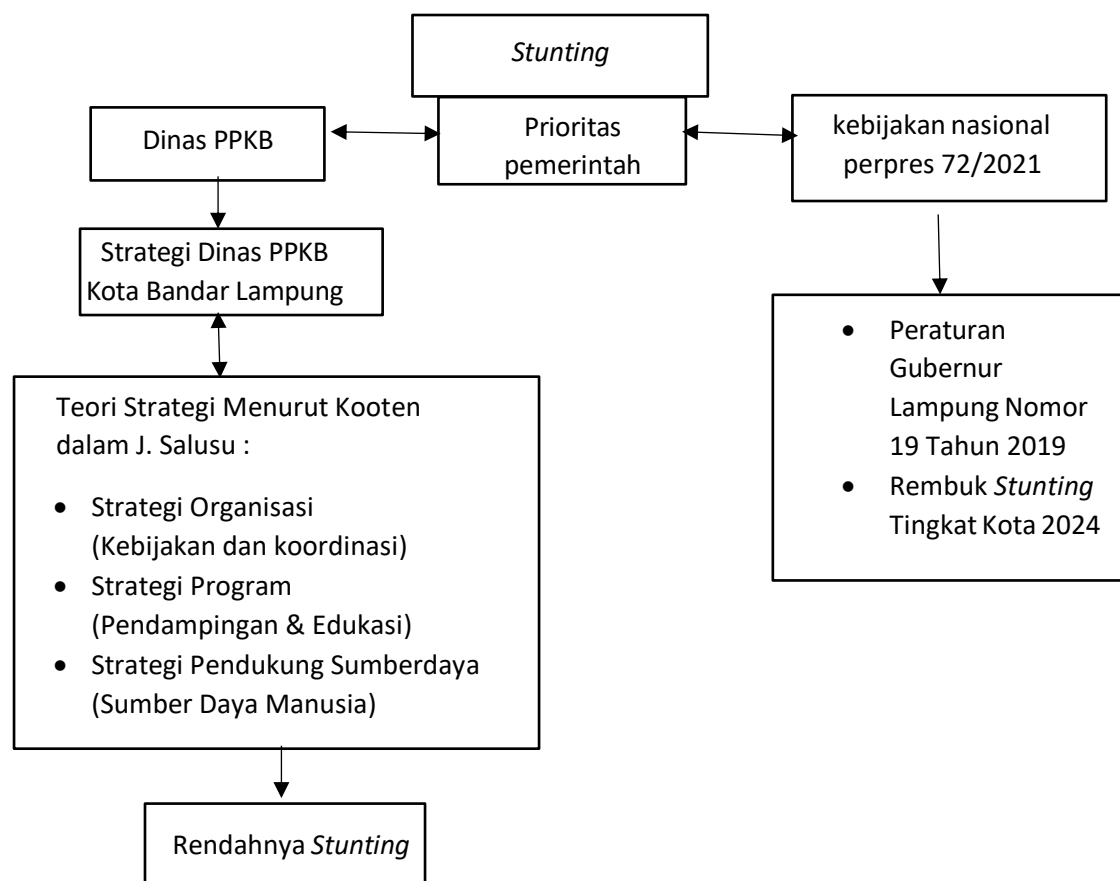
Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan hubungan antara kebijakan nasional, strategi kelembagaan daerah, dan hasil yang diharapkan dalam percepatan penurunan *stunting* di Kota Bandar Lampung, khususnya di Kecamatan Rajabasa. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* telah menetapkan target penurunan prevalensi *stunting* hingga 14% pada tahun 2024. Kebijakan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan program penanganan *stunting* yang terintegrasi lintas sektor.

Dalam konteks Provinsi Lampung, kebijakan tersebut dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 dan diperkuat dengan Rembuk *Stunting* Kota 2024 sebagai wujud komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Implementasi kebijakan ini di tingkat kota dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung, yang memiliki peran strategis sebagai koordinator dalam pelaksanaan program penurunan *stunting* melalui penguatan fungsi keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi lintas sektor.

Kerangka pikir penelitian ini mengacu pada teori strategi menurut Kooten dalam J. Salusu (1996) yang membagi strategi ke dalam tiga jenis utama, yaitu Strategi Organisasi (Corporate Strategy), Strategi Program (*Program Strategy*), dan Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*).

- Strategi Organisasi berkaitan dengan arah dan misi kelembagaan Dinas PPKB dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat kota.
- Strategi Program meliputi bentuk-bentuk intervensi spesifik dan sensitif, seperti pemberdayaan keluarga berisiko *stunting*, edukasi gizi, penguatan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta peningkatan kolaborasi dengan sektor kesehatan.
- Strategi Pendukung Sumber Daya berfokus pada optimalisasi tenaga pelaksana, pendanaan, sarana prasarana, dan dukungan data terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan program.

Ketiga strategi tersebut diharapkan mampu menciptakan sinergi antara kebijakan pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menurunkan angka *stunting* secara signifikan. Dalam konteks penelitian ini, strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dipandang berkontribusi terhadap rendahnya prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajabasa, yang menjadi wilayah dengan capaian terbaik di Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, hubungan antara kebijakan nasional, strategi kelembagaan daerah, dan partisipasi masyarakat menjadi komponen utama dalam kerangka pikir penelitian ini, yang bermuara pada tujuan akhir berupa rendahnya angka *stunting*.



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan penjelasan kualitatif. Sugiyono (2012:9) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya. Kurniawan (2012:34) menjelaskan Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya sudah ada tanpa proses manipulasi (data masa lalu dan sekarang).

Berdasarkan keterangan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peneliti menggunakan metode kualitatif agar dapat mengenali subyek. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

Penulis juga diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan dan kejadian dalam konteks yang diteliti. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, dan kasus yang dipelajari berupa Strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Rajabasa memiliki prevalensi *stunting* rendah, yang menunjukkan adanya praktik baik dalam upaya pencegahan dan penanganan *stunting*. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti guna melihat bagaimana strategi Dinas PPKB tingkat kota serta keterkaitannya dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian. Penetapan fokus sebagai penelitian penting artinya dalam usaha menentukan batas penelitian. (Moleong 2005:92). Fokus penelitian yang digunakan untuk menganalisis strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dalam Program Percepatan Penurunan *Stunting* dengan menggunakan teori strategi menurut Kootten dalam J. Salusu yang membagi strategi ke dalam tiga jenis utama, yaitu Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*), Strategi Program (*Program Strategy*), dan Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*).

- Strategi Organisasi berkaitan dengan arah dan misi kelembagaan Dinas PPKB dalam mengimplementasikan kebijakan nasional di tingkat kota.
- Strategi Program meliputi bentuk-bentuk intervensi spesifik dan sensitif,

seperti pemberdayaan keluarga berisiko *stunting*, edukasi gizi, penguatan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta peningkatan kolaborasi dengan sektor kesehatan.

- Strategi Pendukung Sumber Daya berfokus pada optimalisasi tenaga pelaksana, pendanaan, sarana prasarana, dan dukungan data terintegrasi untuk menjamin keberlanjutan program.

3.4 Subjek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi program percepatan penurunan *stunting*. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan dengan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian.

Adapun informan penelitian ini meliputi:

- 1) Bapak Ario Ferdika, selaku Pejabat/staf Dinas PPKB Kota Bandar Lampung bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 2) Ibu Evalia, selaku Koordinator Penyuluh KB di Kecamatan Rajabasa
- 3) Ibu Irma Ervina, Ibu Septi, dan Ibu Apriyani, selaku Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK).
- 4) Ibu Wiwit, selaku Masyarakat Kecamatan Rajabasa

Melalui informan tersebut, peneliti berharap memperoleh informasi yang komprehensif terkait strategi, hambatan, serta hasil yang dicapai dalam program percepatan penurunan *Stunting*.

3.5 Jenis Data

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Secara khusus, data primer ini akan berfokus pada informasi yang berkaitan dengan strategi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Dinas PPKB, yang akan dianalisis

menggunakan teori strategi menurut Kootten dalam J. Salusu yang memiliki tiga indikator utama, yaitu:

- Strategi Organisasi: Meliputi data mengenai struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, serta mekanisme koordinasi internal dan eksternal Dinas PPKB dalam pelaksanaan program.
- Strategi Pendukung Sumber Daya: Meliputi data mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, seperti anggaran yang dialokasikan, personel pelaksana (SDM), dan sarana prasarana yang mendukung program.
- Strategi Program: Meliputi data mengenai jenis-jenis program percepatan penurunan *stunting* yang dirancang dan diimplementasikan oleh Dinas PPKB, termasuk tahapan, target sasaran, dan evaluasi program tersebut di lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi dan kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta bukubuku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

- 1) Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali pandangan, pengalaman, dan evaluasi dari para informan kunci.
- 2) Observasi langsung, dilakukan dengan mengamati pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rajabasa.
- 3) Studi dokumentasi, berupa penelaahan arsip, peraturan, laporan kegiatan, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992). Teknik ini dilakukan melalui:

- 1) Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (misalnya antara Dinas PPKB, TPPS, dan masyarakat).
- 2) Triangulasi metode, dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Editing Data*

Editing data adalah kegiatan penelitian yang dikenal sebagai Salah satu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menentukan faktor data yang berhasil diperoleh untuk menjamin validitasnya serta dapat segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini. Peneliti mengolah hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pedoman wawancara, memilah dan menemukan data yang diperlukan untuk penulisan. Dalam hal ini mengolah kegiatan observasi merupakan proses dimana peneliti mengumpulkan informasi yang menarik dari hasil pengamatan untuk dipresentasikan dengan baik.

2. Interpretasi Data

Peneliti memberikan ringkasan dari berbagai data yang telah diubah sesuai dengan faktor penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah dengan menggabungkan hasil analisis data berdasarkan kriteria, pertanyaan atau hal khusus lainnya. Proses interpretasi dilakuakn dengan memberikan narai dan deskripsi dalam bentuk kalimat, data yang memiliki makna akan dianalisis.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari:

- 1) Reduksi data, yakni proses pemilihan, penyederhanaan, serta pengorganisasian data yang relevan dengan fokus penelitian.
- 2) Penyajian data, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan untuk memperjelas temuan penelitian.
- 3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses menafsirkan data berdasarkan teori strategi Kooten dalam J. Salusu, guna menjelaskan bagaimana strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dijalankan dalam program percepatan penurunan *Stunting*.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Secara yuridis, keberadaan dinas ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Melalui regulasi tersebut, Dinas PPKB diberi kewenangan untuk melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan keluarga berencana, ketahanan keluarga, serta pengendalian penduduk di wilayah Kota Bandar Lampung.

Peran Dinas PPKB menjadi semakin signifikan sejak pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menetapkan BKKBN sebagai leading sector penanganan *stunting* secara nasional. Kebijakan ini memberikan mandat besar kepada Dinas PPKB sebagai perpanjangan tangan BKKBN di daerah untuk mengkoordinasikan percepatan penurunan *stunting* secara terintegrasi lintas sektor. Mandat tersebut kemudian diperkuat oleh kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 serta pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.

Di Kota Bandar Lampung, Dinas PPKB mendapat posisi strategis dalam struktur TPPS sebagai koordinator pelaksana, khususnya dalam penguatan keluarga berisiko *stunting* melalui pendekatan pendampingan, penyuluhan, dan

pemutakhiran data keluarga. Peran ini semakin intensif sejalan dengan penguatan berbagai kebijakan pemerintah kota, seperti pelaksanaan Rembuk *Stunting* Kota Bandar Lampung Tahun 2024, serta pengintegrasian program *stunting* ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RKPD dan Renstra OPD. Dengan demikian, Dinas PPKB tidak hanya menjalankan fungsi teknis KB, tetapi juga menjadi aktor utama dalam tata kelola percepatan penurunan *stunting* di tingkat kota.

Secara struktural, Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi empat bidang utama, yakni Bidang Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Bidang Pengendalian Penduduk. Setiap bidang memiliki fungsi yang saling terkait dan mendukung implementasi strategi percepatan penurunan *Stunting*, terutama melalui penyediaan data keluarga berisiko *stunting*, penguatan program pemberdayaan keluarga, serta pendampingan melalui Tim Pendamping Keluarga (TPK). Struktur ini menunjukkan bahwa fungsi Dinas PPKB telah dirancang untuk merespons kebutuhan koordinasi lintas sektor sebagaimana ditegaskan dalam Perpres 72/2021.

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung, tugas pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

c. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;

1. Seksi Penyuluhan dan Komunikasi Informasi Edukasi
2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
3. Seksi Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Perkotaan

d. Bidang Keluarga Berencana;

1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
2. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.

e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;

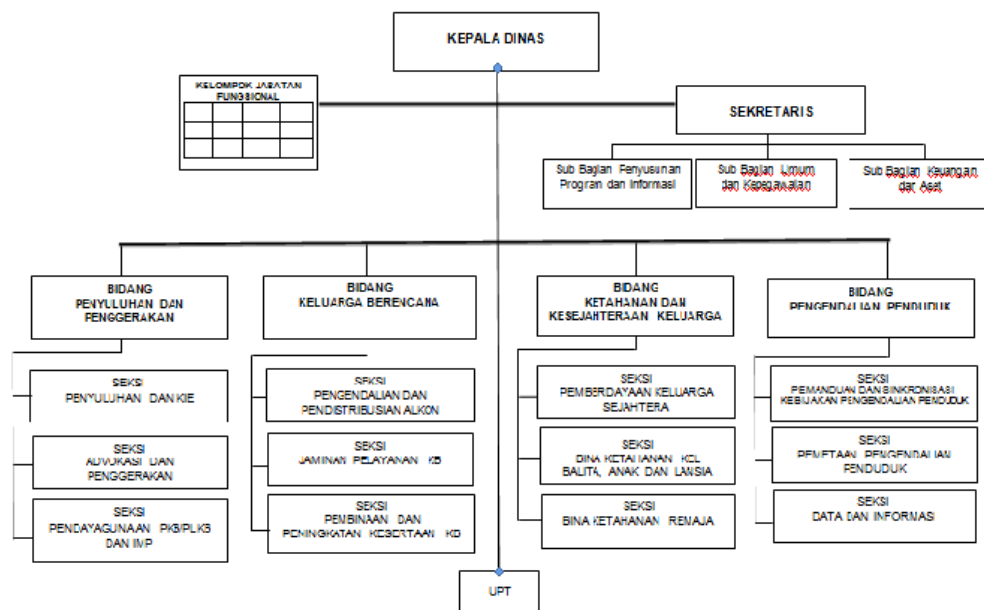
1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.

f. Bidang Pengendalian Penduduk ;

1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
2. Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
3. Seksi Data dan Informasi.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) / Kelompok jabatan fungsional;

Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :



4.1.3 Visi Misi

1. Visi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Bandar Lampung mengikuti Visi Walikota Bandar Lampung yaitu : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat

2. Misi

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung ada dalam Misi ke-Satu Walikota dan Wakil Walikota yaitu: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

4.2 Kecamatan Rajabasa

Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu kecamatan strategis di Kota Bandar Lampung yang memiliki peran penting dalam perkembangan sosial, ekonomi, serta pelayanan publik di wilayah perkotaan. Secara administratif, keberadaan Kecamatan Rajabasa ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Penataan ini sekaligus menegaskan bahwa Kecamatan Rajabasa merupakan wilayah pemekaran dari Kecamatan Kedaton, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Kota Bandar Lampung.

Secara geografis, Kecamatan Rajabasa memiliki luas wilayah 12,88 km² dan terbagi menjadi 7 kelurahan, yaitu: Gedong Meneng, Rajabasa, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya, Gedong Meneng Baru, Rajabasa Pemuka, dan Rajabasa Nunyai. Masing-masing kelurahan memiliki karakteristik fisik dan kepadatan penduduk yang

berbeda, yang turut memengaruhi pola pelayanan publik dan dinamika sosial masyarakat. Kelurahan Rajabasa Jaya memiliki wilayah paling luas dengan persentase 37,90%, sedangkan Gedong Meneng Baru menjadi wilayah terkecil dengan luas 3,22%. Kondisi ini menunjukkan adanya distribusi ruang yang tidak merata yang kemudian berimplikasi pada variasi kebutuhan dan tekanan pelayanan publik di setiap kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Rajabasa meliputi:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Senang dan Kecamatan Labuhan Ratu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Langkapura
- Sebelah Timur : Kecamatan Labuhan Ratu
- Sebelah Barat : Kabupaten Lampung Selatan

Letak geografis ini membuat Rajabasa berada pada posisi yang strategis sebagai kawasan penghubung antara Kota Bandar Lampung dan wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kedudukan tersebut juga menguatkan fungsi Rajabasa sebagai gerbang utama mobilitas masyarakat, terutama melalui keberadaan Terminal Rajabasa Tipe A, yang merupakan simpul transportasi antarprovinsi dan antarkabupaten. Keberadaan terminal utama ini menjadikan Rajabasa sebagai kawasan transit penting yang mempengaruhi karakter sosial, ekonomi, serta tingkat mobilitas masyarakat sehari-hari.

Dari sisi administrasi pemerintahan, Kecamatan Rajabasa pada tahun 2024 memiliki 14 lingkungan (LK) dan 112 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di tujuh kelurahan tersebut. Struktur pemerintahan ini memudahkan pelaksanaan layanan publik hingga ke tingkat paling bawah, terutama dalam pelaksanaan program-program pembangunan seperti kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Kantor kecamatan sendiri berlokasi di Kelurahan Rajabasa Nunyai sebagai pusat koordinasi administrasi kewilayahan.

Selain itu, Rajabasa merupakan kawasan dengan aktivitas pendidikan yang sangat tinggi. Kawasan ini dikenal sebagai koridor pendidikan tinggi karena berdekatan dengan beberapa perguruan tinggi besar seperti Universitas Lampung, Universitas Darmajaya, Universitas Teknokrat Indonesia, dan sejumlah institusi pendidikan

lainnya. Persebaran perguruan tinggi tersebut menyebabkan komposisi penduduk Rajabasa didominasi oleh kelompok usia produktif dan mahasiswa, yang turut memengaruhi perkembangan sektor jasa, perdagangan, dan sewa hunian di wilayah tersebut. Aktivitas pendidikan yang tinggi juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan fasilitas umum seperti transportasi, permukiman, dan layanan kesehatan.

Letak strategis Rajabasa tidak hanya terlihat dari sisi pendidikan, tetapi juga aktivitas ekonomi yang semakin berkembang. Sepanjang koridor ZA Pagar Alam dan Jalan Untung Suropati misalnya, berbagai usaha perdagangan dan jasa tumbuh pesat, menjadikan Rajabasa sebagai salah satu kawasan dengan mobilitas ekonomi tertinggi di Kota Bandar Lampung. Kondisi ini juga mendorong meningkatnya arus lalu lintas serta intensitas pelayanan pemerintahan dalam mengatur dinamika kebutuhan masyarakat perkotaan.

Aksesibilitas Rajabasa juga tergolong sangat baik. Berdasarkan data Pemerintah Kota Bandar Lampung, jarak antar kelurahan menuju pusat kecamatan hanya berkisar 1-2 kilometer, sedangkan jarak menuju pusat pemerintahan Kota Bandar Lampung berkisar 8-13 kilometer. Selain itu, kecamatan ini dilalui oleh jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan kawasan permukiman, pusat pendidikan, dan terminal. Kondisi ini menjadikan Rajabasa sebagai salah satu wilayah dengan kemudahan akses transportasi dan distribusi layanan publik yang relatif baik dibanding kecamatan lainnya.

Dalam konteks kesehatan masyarakat, Kecamatan Rajabasa merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi *Stunting* terendah di Kota Bandar Lampung pada periode 2021-2024. Pada tahun 2022 bahkan angka *Stunting* hanya berada pada titik 0,32%, jauh di bawah rata-rata kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi program percepatan penurunan *Stunting*, baik melalui Dinas PPKB, Dinas Kesehatan, maupun kader kesehatan di tingkat kelurahan, relatif berjalan efektif di wilayah ini. Selain itu, meskipun Rajabasa masuk kategori wilayah “rentan pangan sedang” menurut FSVA 2022, capaian prevalensi yang rendah menunjukkan adanya keberhasilan dalam menjaga ketahanan gizi keluarga berisiko.

Dengan berbagai karakteristik tersebut, Kecamatan Rajabasa menjadi lokasi penelitian yang sangat relevan untuk mengkaji strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*. Dinamika kependudukan, keberadaan pusat layanan pendidikan, serta capaian angka *stunting* yang rendah memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi strategi lintas sektor di tingkat kecamatan. Selain itu, Rajabasa juga dapat dijadikan model wilayah dengan kinerja baik dalam upaya percepatan penurunan *stunting* yang dapat direplikasi di kecamatan lain dengan tantangan lebih kompleks.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rajabasa telah berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan kerangka kebijakan nasional maupun daerah. Penerapan tiga bentuk strategi menurut Kooten strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya masing-masing saling melengkapi dan berkontribusi terhadap rendahnya prevalensi *stunting* di wilayah penelitian.

Strategi organisasi menegaskan kejelasan arah kebijakan Dinas PPKB dalam melaksanakan mandat Perpres 72 Tahun 2021 dan peraturan daerah, yang kemudian diterjemahkan ke tingkat kecamatan melalui penguatan koordinasi lintas sektor serta pelaksanaan fungsi kelembagaan TPPS. Strategi program memperlihatkan implementasi intervensi spesifik dan sensitif yang merata pada sasaran, terutama terhadap keluarga berisiko *stunting* melalui edukasi gizi, pemantauan kesehatan balita, pendataan keluarga, dan optimalisasi peran Tim Pendamping Keluarga (TPK). Strategi pendukung sumber daya juga menjadi aspek yang menentukan keberhasilan, terlihat dari pemanfaatan SDM penyuluh, kader posyandu, sarana prasarana, serta dukungan data berbasis keluarga (PK, EPPBGM) sebagai dasar pengambilan keputusan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa capaian Kecamatan Rajabasa sebagai wilayah dengan prevalensi terendah bukan semata-mata hasil intervensi teknis, melainkan buah dari tata kelola program yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Meskipun terdapat hambatan seperti keterbatasan tenaga pelaksana, variasi partisipasi masyarakat, dan tantangan koordinasi, capaian tersebut membuktikan bahwa strategi lintas sektor yang dipimpin oleh Dinas PPKB mampu berjalan efektif ketika didukung oleh komitmen kelembagaan, integrasi data, dan pemberdayaan keluarga.

Dengan demikian, pembahasan ini mempertegas bahwa keberhasilan penurunan *stunting* tidak hanya bergantung pada intervensi gizi dan kesehatan anak, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, koordinasi aktor, perencanaan sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat. Hasil analisis ini menjadi dasar perspektif akademik bahwa pendekatan strategis berbasis keluarga adalah model yang relevan untuk diterapkan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini sekaligus memberi pijakan bagi bagian kesimpulan dan saran yang akan menguraikan kontribusi penelitian serta rekomendasi ke depan dalam memperkuat keberlanjutan program percepatan penurunan *stunting*.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rajabasa, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penurunan *stunting* telah dijalankan melalui pendekatan strategis yang terstruktur dan berorientasi pada penguatan peran keluarga. Analisis penelitian ini menggunakan teori strategi Kooten dalam J. Salusu yang menempatkan strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan kebijakan publik.

Strategi organisasi yang diterapkan oleh Dinas PPKB Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya upaya kelembagaan yang kuat dalam menerjemahkan kebijakan nasional dan daerah ke dalam praktik di tingkat lokal. Hal ini tercermin dari terbentuknya mekanisme koordinasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), keterlibatan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta penguatan fungsi penyuluhan dan pendampingan keluarga oleh Penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Strategi organisasi ini telah mampu menciptakan pola kerja kolaboratif yang mendukung pelaksanaan program di Kecamatan Rajabasa.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa strategi organisasi masih menghadapi keterbatasan pada aspek regulasi daerah yang bersifat khusus dan mengikat, sehingga keberlanjutan koordinasi lintas sektor masih sangat bergantung pada komitmen administratif dan kebijakan jangka pendek pemerintah daerah.

Strategi program yang dijalankan oleh Dinas PPKB Kota Bandar Lampung berorientasi pada pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif secara simultan, dengan fokus utama pada pendampingan keluarga berisiko *stunting*, edukasi gizi dan kesehatan keluarga, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Strategi ini menunjukkan kesesuaian dengan pendekatan multisektor yang direkomendasikan dalam kebijakan nasional percepatan penurunan *stunting*.

Implementasi strategi program di Kecamatan Rajabasa dinilai efektif karena menyentuh langsung sasaran utama, yaitu keluarga, serta melibatkan peran aktif kader dan masyarakat. Hal tersebut berkontribusi pada capaian rendahnya prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajabasa dibandingkan kecamatan lain di Kota Bandar Lampung. Meskipun demikian, efektivitas strategi program masih dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata serta intensitas pendampingan yang belum optimal di seluruh wilayah.

Sementara itu, strategi pendukung sumber daya merupakan dimensi yang paling lemah dalam pelaksanaan strategi percepatan penurunan *stunting*. Penelitian ini menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kapasitas tenaga pendamping di lapangan, serta belum optimalnya pemanfaatan anggaran dan sistem data terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Keterbatasan ini berpotensi menghambat keberlanjutan program dalam jangka panjang apabila tidak diikuti dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan sumber daya yang memadai. Dengan demikian, strategi pendukung sumber daya belum sepenuhnya mampu menopang strategi organisasi dan strategi program secara optimal.

Secara keseluruhan, strategi Dinas PPKB Kota Bandar Lampung dalam program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rajabasa dapat dikategorikan cukup efektif dalam mencapai tujuan kebijakan, khususnya dalam menekan prevalensi *stunting*. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari sinergi antara strategi organisasi yang terkoordinasi dan strategi program yang berorientasi pada keluarga, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan strategi pendukung sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan penurunan *stunting* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga sangat bergantung pada

kekuatan tata kelola kelembagaan, kesinambungan dukungan sumber daya, serta partisipasi masyarakat sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan publik. Oleh karena itu, penguatan strategi secara menyeluruh menjadi prasyarat penting untuk memastikan percepatan penurunan *stunting* yang berkelanjutan di tingkat daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Bandar Lampung dalam program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Rajabasa, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, pada aspek strategi organisasi, Dinas PPKB Kota Bandar Lampung disarankan untuk memperkuat landasan regulasi daerah yang secara khusus mengatur percepatan penurunan *stunting*. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali) yang bersifat komprehensif dan mengikat dinilai penting untuk menjamin kesinambungan koordinasi lintas sektor serta memperjelas pembagian peran antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Regulasi yang kuat akan mencegah ketergantungan pelaksanaan program pada kebijakan administratif jangka pendek dan memastikan bahwa strategi percepatan penurunan *stunting* menjadi agenda pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kedua, pada aspek strategi program, Dinas PPKB Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kualitas dan pemerataan implementasi program pendampingan keluarga berisiko *stunting*. Intensitas pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan penyuluh KB perlu diperkuat, terutama dalam meningkatkan partisipasi aktif keluarga dan masyarakat. Selain itu, strategi komunikasi dan edukasi gizi perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima. Penguatan monitoring dan evaluasi program secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa intervensi spesifik dan sensitif benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap penurunan *stunting*.

Ketiga, pada aspek strategi pendukung sumber daya, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kapasitas tenaga pendamping di lapangan. Peningkatan kompetensi kader dan TPK melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika lapangan. Selain itu, optimalisasi alokasi anggaran serta pemanfaatan data terintegrasi, seperti data keluarga berisiko *stunting*, perlu ditingkatkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Penguatan sistem data akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Keempat, bagi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran untuk mempertahankan capaian rendahnya prevalensi *stunting* di Kecamatan Rajabasa. Pemerintah wilayah disarankan untuk terus mendorong kolaborasi dengan tokoh masyarakat, kader posyandu, dan lembaga lokal dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pola asuh, pemenuhan gizi, dan ketahanan keluarga. Pendekatan partisipatif menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan hasil program penurunan *stunting* di tingkat lokal.

Kelima, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara lebih objektif pengaruh strategi organisasi, strategi program, dan strategi pendukung sumber daya terhadap penurunan prevalensi *stunting*. Selain itu, penelitian komparatif antar kecamatan atau antar daerah juga penting dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai variasi keberhasilan strategi penurunan *stunting* di tingkat pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Lampung. (2021). Bandar Lampung Optimistis Capai Prevalensi *Stunting* 10 Persen pada 2024.
- Arini, S., & Suhandi, R. (2024). Strategi Komunikasi Publik Dinas Kesehatan dalam Edukasi Gizi Balita. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–58.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2021. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. 2024. Kecamatan Rajabasa Dalam Angka 2024. Bandar Lampung: BPS Kota Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2023. Provinsi Lampung Dalam Angka 2023. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung.
- Beal, T., Tumilowicz, A., Sutrisna, A., Izwardy, D., & Neufeld, L. M. (2018). *A review of child Stunting determinants in Indonesia. Maternal & Child Nutrition*, 14(4), e12617.
- BKKBN. (2022). Buku Pegangan 3: Dapur Sehat Atasi *Stunting* di Kampung Keluarga Berkualitas (DASHAT): Ragam Menu Sehat dan Bergizi. Jakarta: Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan.
- BKKBN. (2023). Laporan Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan *Stunting*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- BKKBN. (2024). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024
- David, F.R. 2016. *Strategic Management*. Pearson
- Dewey, K. G., & Begum, K. (2021). *Long-term consequences of Stunting in early life. Maternal & Child Nutrition*, 17(2), e13147.
- Fitriani, N., & Yuliani, D. (2023). Penguatan kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan *Stunting*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 211–225.
- Hakim, M. A. (2024). Evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam implementasi 8 Aksi Konvergensi *Stunting*. Lampung: Universitas Lampung.
- Hakim, N. (2024). Analisis Kolaborasi Lintas Sektor dalam Program *Stunting* di Provinsi Lampung.
- Hossain, M., Choudhury, N., Abdullah, K. A. B., Mondal, P., Jackson, A. A., Walson, J., & Ahmed, T. (2020). *Evidence-based approaches to childhood*

Stunting in low and middle income countries: a systematic review. Archives of Disease in Childhood, 105(10), 933–940.

- Jumroh, & Pratama, Y. (2021). Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Repository IAIN Kudus.
- Jurnas.com. (2023, Februari). “Ber-KB Jurus Kota Bandar Lampung Tekan Angka Prevalensi *Stunting*.”
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). Laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Jakarta: Setneg RI.
- Nugroho, R. (2021). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurhadi, H. (2022). Dinamika kelembagaan dalam implementasi kebijakan kesehatan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 25–38.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2021. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2023. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026. Bandar Lampung.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. 2024. Profil Kecamatan Rajabasa. Bandar Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2023). *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* 2023.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2019. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*. Bandar Lampung.
- Pratiwi, A., & Kurniawan, Y. (2023). Tantangan peran institusi pemerintah dalam percepatan pembangunan kesehatan. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 11(2), 112–128.
- Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2019). *The Stunting syndrome in developing countries. Paediatrics and International Child Health*, 39(2), 65–72.
- Putri, A., & Handayani, T. (2020). Analisis peran pemerintah daerah dalam program percepatan penurunan *Stunting*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 155–168.

- Putri, Y., Sari, M., & Fadilah, N. (2022). Koordinasi lintas sektor dalam percepatan penurunan *Stunting*. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 11(1), 23–35.
- Rahmadani, F., & Lubis, Z. (2023). Efektivitas Perpres No. 72 Tahun 2021 di Kecamatan Lubuk Pakam. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Rahmadani, R., & Lubis, F. (2023). Implementasi Perpres No. 72 Tahun 2021 dalam Penurunan *Stunting* di Kabupaten Langkat.
- Rahman, M. S., Howlader, T., Masud, M. S., & Rahman, M. L. (2021). *Association of low-birth weight and malnutrition with Stunting in children under five years. BMC Nutrition*, 7(1), 1–9.
- Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). *Sociological Theory* (10th ed.). SAGE Publications.
- RMOL Lampung. (2024). Angka Prevalensi *Stunting* Bandar Lampung 2023 Naik Jadi 13,40 Persen.
- Salusu, J. 2015. Pengambilan Keputusan Strategik. Jakarta: Grasindo
- Saputra, A. (2025). Formulasi Kebijakan Daerah dalam Upaya Penurunan *Stunting* di Indonesia.
- Sari, D., & Nugroho, B. (2021). Peran BKKBN dalam program penurunan *Stunting* di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 45–59.
- Septiasari, T., Rahayu, D., & Lestari, F. (2022). Edukasi gizi dalam pencegahan *Stunting*. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 102–111.
- Sulastri, M., & Widiyanto, D. (2023). Peran Dinas PPKB dalam Pemberdayaan Keluarga Berisiko *Stunting* di Kota Semarang.
- UNICEF, WHO, & World Bank. (2019). *Levels and Trends in Child Malnutrition. Geneva: World Health Organization*.
- UNICEF. (2021). Situasi Anak di Indonesia: Pencegahan *Stunting*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- WHO. (2020). *WHO Child Growth Standards. Geneva: World Health Organization*.